

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi, H. Prianto. 2015. Buku Pintar Pajak, Jakarta: Pratama Indomitra.
- Eddy O.S Hiraej. 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fidel. 2015. Tindak Pidana Perpajakan. Jakarta: Carofin Media
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard. 2013. Hukum Pajak, Teori, Analisa, dan Perkembangannya, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Johnny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R. 2018. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1997. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nahak, Simon. 2015. Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum, Malang: Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum Edisi Pertama, Cetakan Ke-4. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 2016. Hukum Kejahatan Bisnis. Jakarta: Kencana
- Ruba'I, Masruchin, dkk.. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative.
- Salim H.S., dkk. 2012. Hukum Pidana Khusus. Jakarta:Rajawali Press
- Sihombing, Jonker. 2013. Pokok-Pokok Hukum Pajak. Jakarta: Ref Publisher.

Simon Nahak. 2015. Hukum Pidana Perpajakan Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum. Malang: Setara Press.

Sofyan, Andi dan Azisa, Nur. 2016. Hukum Pidana. Makassar: Pustaka Pena Press.

Suandy, Erly. 2016. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo, Bambang. 2006. Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.

Wiryo Projudikoro. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak.

Jurnal:

Achmad, Ruben. 2016. Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Direktorat Jenderal Pajak (2018) *Siaran Pers DJP Suspend 1.049 WP Terindikasi Penerbit Faktur Ilegal*. Jakarta, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. (Nomor: 04/2018).

Ningrum, Diajeng Kusuma, Ispiyarso, Budi, dkk., 2016. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara. *Jurnal Law Reform* Volume 12 Nomor 2 Tahun 2016. Semarang: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Nurjihan, Andi. 2014. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Nasabah pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Bone. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.

Tarmundi. 2013. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Skripsi. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Website:

www.bppk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 10 Juli Tahun 2019 Pukul 10.00 WIB

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/> diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 15.40 WIB.

[www. Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id) diakses tanggal 11 Juli 2019 Pukul 11.30 WIB

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 211/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL